



PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK TERLANTAR MELALUI PROGRAM PERMAKINAN

Farida Sartika¹, Nanang Juhandi Hermawan², Maria Ulfah Awaliyah Suryana³

^{*123}Ilmu Pemerintahan, STISIP Guna Nusantara Cianjur

*Corresponding author: iida31671@gmail.com

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Terima: 14-03-2026

Revisi: 21-03-2026

Disetujui: 07-04-2026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak terlantar melalui program permakinan di Kabupaten Cianjur. Permasalahan anak terlantar sebagai bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih menjadi isu krusial di daerah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang melibatkan pihak Dinas Sosial dan pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah telah berjalan cukup efektif dilihat dari tiga indikator utama, yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Pemerintah telah menyediakan bantuan permakinan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, menetapkan regulasi yang mendukung pelaksanaan program, serta mendorong peningkatan kesejahteraan anak terlantar. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti belum meratanya distribusi bantuan, kurangnya pembinaan terhadap LKS, serta keterbatasan sumber daya manusia yang belum menguasai teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi sistem distribusi bantuan agar program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah, Kesejahteraan Sosial, Program Permakinan, LKS.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the government in improving the social welfare of neglected children through the food assistance program in Cianjur Regency. The issue of neglected children, as part of the Social Welfare Problems (PMKS) category, remains a critical concern at the local level, particularly in fulfilling basic needs such as food and nutrition. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation. Informants were selected using purposive sampling, involving officials from the Social Affairs Office and managers of Social Welfare Institutions (LKS). Data analysis was conducted

through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing, while data validity was ensured through triangulation. The results indicate that the government's role has been relatively effective, as reflected in three main indicators: facilitator, regulator, and catalyst. The government has provided food assistance as a means of fulfilling basic needs, established regulations supporting program implementation, and promoted the improvement of social welfare among neglected children. However, several challenges remain, including uneven distribution of assistance, limited institutional guidance for LKS, and insufficient human resources with adequate information technology skills. Therefore, strengthening policy frameworks, enhancing institutional capacity, and optimizing the distribution system are necessary to ensure that the program operates more effectively and sustainably.

Keywords: *Government Role, Social Welfare, Food Assistance Program, Social Welfare Institutions.*

PENDAHULUAN

Permasalahan kesejahteraan sosial masih menjadi isu strategis dalam pembangunan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai kebijakan telah dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kenyataannya masih terdapat kelompok rentan yang belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya secara layak. Salah satu kelompok tersebut adalah anak terlantar, yang termasuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Anak terlantar merupakan individu yang tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar secara memadai, baik dari aspek fisik, mental, sosial, maupun emosional akibat kondisi keluarga, ekonomi, atau lingkungan yang tidak mendukung (Bharoto et al., 2020).

Secara normatif, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan anak terlantar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu menjalankan fungsi sosialnya. Dengan demikian, pemerintah memiliki peran sentral dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar.

Salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut adalah melalui program permakanan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak terlantar, khususnya dalam aspek pangan dan gizi, sebagai fondasi utama dalam mendukung tumbuh kembang anak. Keberadaan program ini tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial kelompok rentan. Namun demikian, implementasi program permakanan di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Permasalahan seperti distribusi bantuan yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pembinaan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta adaptasi terhadap sistem berbasis teknologi menjadi hambatan dalam optimalisasi program (Achmad, 2021;

Nikmah, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

Kabupaten Cianjur sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat juga tidak terlepas dari permasalahan tersebut. Masih ditemukannya anak terlantar yang membutuhkan perhatian khusus menunjukkan bahwa upaya pemerintah belum sepenuhnya optimal. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang menjadi mitra pemerintah memiliki peran penting dalam menjangkau anak-anak tersebut, namun masih menghadapi keterbatasan dalam kapasitas dan sumber daya.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi terhadap peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak terlantar melalui program permakanan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada sejauh mana program tersebut berjalan, tetapi juga mengkaji efektivitas peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam konteks implementasi kebijakan sosial. Selain itu, penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan kualitas program, memperbaiki tata kelola distribusi bantuan, serta memperkuat kapasitas kelembagaan LKS.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian kebijakan sosial, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani permasalahan anak terlantar.

LANDASAN TEORI

Peran Pemerintah

Peran pemerintah merupakan konsep penting dalam kajian ilmu pemerintahan dan kebijakan publik, yang merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuan negara (Ngongira & Iriani, 2020)(Setiadi et al., 2025). Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), yang berarti ketika seseorang atau lembaga menjalankan hak dan kewajibannya, maka ia sedang melaksanakan perannya (Humaidi, 2022). Dalam konteks pemerintahan, peran tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program, serta pelayanan publik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Ciciria et al., 2021)(Setadi et al., 2026).

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan kesejahteraan sosial melalui berbagai fungsi yang dijalankannya (Wahidah, 2018). Ryaas Rasyid dalam Thariq et al. (2023) menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Fungsi pelayanan berkaitan dengan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, fungsi pemberdayaan bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, sedangkan fungsi pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Dalam kajian yang lebih operasional, Gede Diva dalam Jaelani dan Fidaris (2024) mengemukakan bahwa peran pemerintah dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu

sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan berbagai sarana, prasarana, dan bantuan yang diperlukan masyarakat, termasuk dalam bentuk program sosial seperti bantuan permakanan. Sebagai regulator, pemerintah menetapkan aturan, kebijakan, dan mekanisme yang mengatur pelaksanaan program agar berjalan secara tertib, adil, dan efektif. Sementara itu, sebagai katalisator, pemerintah berperan dalam mempercepat proses perubahan sosial dengan mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga terkait.

Ketiga peran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bertindak sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai pengarah dan pendorong perubahan sosial. Dalam konteks penelitian ini, peran pemerintah menjadi variabel utama yang menentukan keberhasilan program permakanan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak terlantar. Oleh karena itu, analisis terhadap peran pemerintah menjadi penting untuk memahami sejauh mana fungsi-fungsi tersebut telah dijalankan secara optimal.

Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan konsep multidimensional yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik material, spiritual, maupun social (Ribanszki et al., 2022). Secara umum, kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar individu sehingga mereka dapat hidup secara layak dan berfungsi secara optimal dalam masyarakat (Simanjuntak & Erwinsyah, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri.

Menurut Walter A. Friedlander dalam Andari (2020) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan sosial dan institusi yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok dalam mencapai standar hidup yang memadai. Konsep ini menekankan bahwa kesejahteraan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan hasil dari intervensi sosial yang dilakukan oleh negara dan masyarakat. Sementara itu, Arthur Dunham dalam Habibullah (2020) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial mencakup kegiatan yang terorganisasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan sosial, perlindungan, rehabilitasi, dan pencegahan masalah sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial bersifat preventif sekaligus kuratif, yaitu mencegah terjadinya masalah sosial serta mengatasi masalah yang telah terjadi.

Dalam praktiknya, kesejahteraan sosial mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap layanan tersebut (Barbosa, 2024). Dalam konteks anak terlantar, kesejahteraan sosial menjadi sangat penting karena kelompok ini memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri (Zaradiva & Megawati, 2023). Dengan demikian, kesejahteraan sosial tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari kemampuan individu untuk menjalankan fungsi sosialnya secara

optimal. Oleh karena itu, program-program pemerintah seperti bantuan permakanan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan kelompok masyarakat yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak (Lende et al., 2021). PMKS mencakup individu, keluarga, atau kelompok yang menghadapi masalah sosial akibat faktor ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Keberadaan PMKS menjadi indikator adanya ketimpangan sosial yang memerlukan perhatian dan intervensi dari pemerintah. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, PMKS terdiri dari berbagai kategori, seperti fakir miskin, anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya (Lende et al., 2021). Salah satu karakteristik utama PMKS adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, sehingga memerlukan bantuan dari pihak luar, baik pemerintah maupun masyarakat.

Dalam perspektif teori kesejahteraan sosial, PMKS merupakan kelompok yang menjadi sasaran utama dalam kebijakan sosial. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada kelompok ini agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya (Habibullah, 2020). Program-program seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi merupakan bentuk intervensi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan PMKS (Handayani, 2020). Anak terlantar sebagai bagian dari PMKS memiliki tingkat kerentanan yang tinggi karena mereka berada pada fase perkembangan yang membutuhkan perhatian khusus. Ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak menyebabkan mereka rentan terhadap berbagai risiko sosial seperti kekerasan, eksploitasi, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan (Ogunkan, 2023).

Dengan demikian, penanganan PMKS memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Dalam penelitian ini, PMKS menjadi konteks utama dalam melihat bagaimana peran pemerintah melalui program permakanan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial anak terlantar.

Program Permakanan sebagai Kebijakan Sosial

Program permakanan merupakan salah satu bentuk kebijakan sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak terlantar. Program ini biasanya berupa pemberian bantuan makanan atau dana untuk pemenuhan kebutuhan pangan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan oleh pemerintah (Nikmah & Rahaju, 2021).

Dalam perspektif kebijakan publik, program permakanan termasuk dalam kategori bantuan sosial (social assistance) yang bersifat langsung dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (Hudang & Rewa, 2024; Nikmah & Rahaju, 2021). Program ini menjadi bagian dari fungsi redistribusi pemerintah dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan program permakanan sangat bergantung pada beberapa

faktor, antara lain ketepatan sasaran, efektivitas distribusi, transparansi pengelolaan, serta kapasitas kelembagaan pelaksana (Caminada et al., 2020; Kakwani et al., 2021). Selain itu, dukungan regulasi dan pengawasan juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Program permakanan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup anak terlantar, terutama dalam pemenuhan kebutuhan gizi yang menjadi dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, anak-anak diharapkan dapat memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik serta kemampuan belajar yang optimal (Andriani et al., 2021; Fatkuriyah & Sukowati, 2022).

Namun, dalam implementasinya, program ini sering menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, distribusi yang tidak merata, serta kurangnya koordinasi antar lembaga (Rochana et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar program dapat berjalan lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif (Nahlati et al., 2023), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak terlantar melalui program permakanan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara holistik berdasarkan perspektif informan di lapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam program permakanan, seperti pegawai Dinas Sosial dan pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh data yang komprehensif.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi serta mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai peran pemerintah dalam program permakanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Cianjur telah menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak terlantar melalui program permakanan. Peran ini diwujudkan dalam bentuk penyediaan bantuan kebutuhan dasar berupa makanan bagi anak terlantar yang berada di bawah naungan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Bantuan tersebut diberikan secara berkala dengan tujuan

untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi harian anak-anak. Selain itu, pemerintah juga memberikan kemudahan akses bagi LKS dalam mengajukan bantuan melalui sistem administrasi yang telah ditentukan. Dalam beberapa kasus, pemerintah turut memberikan informasi dan sosialisasi terkait mekanisme pengajuan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memfasilitasi lembaga sosial agar dapat mengakses program secara optimal. Hal ini sejalan dengan konsep peran fasilitator yang dikemukakan dalam penelitian Jaelani dan Fidaris, (2024), di mana pemerintah seharusnya menyediakan sarana, prasarana, dan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat..

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peran fasilitator ini belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat LKS yang belum mendapatkan bantuan secara merata, terutama yang memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi atau teknologi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam distribusi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Jika dikaitkan dengan teori Gede Diva dalam Jaelani dan Fidaris (2024), peran fasilitator seharusnya tidak hanya sebatas penyediaan bantuan, tetapi juga mencakup pembinaan dan pendampingan kepada lembaga penerima manfaat. Dengan demikian, diperlukan peningkatan intensitas pembinaan agar seluruh LKS memiliki kapasitas yang sama dalam mengakses program.

Peran Pemerintah sebagai Regulator

Dalam aspek regulator, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan aturan yang mengatur pelaksanaan program permakanan. Regulasi ini mencakup prosedur pengajuan bantuan, kriteria penerima, mekanisme penyaluran, hingga sistem pelaporan dan evaluasi program. Keberadaan regulasi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola program yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang diterapkan oleh pemerintah terus mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan kebutuhan di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program melalui perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Namun, perubahan regulasi yang cukup dinamis justru menjadi tantangan bagi sebagian LKS. Tidak semua lembaga mampu mengikuti perkembangan kebijakan, terutama yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan akses terhadap informasi. Akibatnya, beberapa LKS mengalami keterlambatan atau bahkan tidak dapat mengakses bantuan karena tidak memenuhi persyaratan administratif terbaru.

Dalam perspektif teori, peran regulator menurut Ryaas Rasyid dalam Thariq et al. (2023) menekankan pentingnya stabilitas dan kejelasan kebijakan agar dapat diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap perubahan regulasi disertai dengan sosialisasi yang memadai agar dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator terlihat dari upaya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan sosial anak terlantar melalui program permakanan. Program ini tidak hanya

berfungsi sebagai bantuan jangka pendek, tetapi juga sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup anak-anak melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program permakanan memberikan dampak positif terhadap kondisi anak terlantar, khususnya dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan dasar. Anak-anak yang menerima bantuan memiliki asupan makanan yang lebih terjamin, sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Namun, peran katalisator pemerintah masih belum maksimal dalam hal pemberdayaan LKS. Pemerintah belum secara optimal memberikan pembinaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas lembaga dalam mengelola program dan mengembangkan layanan sosial. Akibatnya, program permakanan cenderung bersifat bantuan konsumtif dan belum sepenuhnya mendorong kemandirian lembaga.

Menurut teori Gede Diva, peran katalisator seharusnya mampu mempercepat perubahan sosial melalui pemberdayaan dan inovasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk menjadikan program permakanan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan sosial yang berkelanjutan. Hal ini mengonfirmasi temuan dalam penelitian Andriani et al. (2021) serta Fatkuriyah & Sukowati (2022) yang menyatakan bahwa pemenuhan gizi melalui bantuan pangan secara strategis meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan belajar anak

Hambatan dalam Pelaksanaan Program Permakanan

Pelaksanaan program permakanan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak terlantar di Kabupaten Cianjur masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural maupun teknis. Salah satu hambatan utama adalah belum meratanya distribusi bantuan kepada seluruh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Hal ini menyebabkan masih adanya anak terlantar yang belum sepenuhnya terjangkau oleh program. Ketimpangan distribusi ini dipengaruhi oleh keterbatasan data yang belum sepenuhnya akurat serta kendala dalam proses verifikasi penerima bantuan. Kondisi ini selaras dengan tantangan implementasi program sosial yang diidentifikasi oleh Achmad (2021) dan Nikmah (2023), di mana distribusi yang tidak merata dan kendala sistem berbasis teknologi masih menjadi penghambat utama optimalisasi program di berbagai daerah

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di tingkat LKS juga menjadi kendala signifikan. Banyak pengelola LKS yang belum memiliki kemampuan yang memadai dalam mengoperasikan sistem berbasis teknologi, terutama dalam proses administrasi dan pelaporan program. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan pengajuan maupun pencairan bantuan. Hal ini merupakan isu krusial dalam kebijakan sosial modern yang menuntut digitalisasi, sebagaimana ditekankan oleh Nikmah (2023) mengenai hambatan adaptasi sistem berbasis teknologi. Hambatan lainnya adalah kurangnya pembinaan dan pendampingan dari pemerintah kepada LKS. Minimnya kegiatan pelatihan menyebabkan kapasitas kelembagaan tidak berkembang secara optimal. Di sisi lain, dinamika perubahan regulasi yang cukup cepat juga menimbulkan kesulitan bagi LKS dalam menyesuaikan diri. Secara keseluruhan, hambatan-

hambatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi program masih memerlukan perbaikan dalam aspek tata kelola, sumber daya, dan koordinasi antar pihak terkait.

Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Hambatan

Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Cianjur telah melakukan sejumlah upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program permakanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah perbaikan sistem pendataan penerima bantuan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan adanya sistem pendataan yang lebih terintegrasi, diharapkan penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran dan merata. Selain itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi secara berkala kepada LKS terkait mekanisme program, termasuk prosedur pengajuan, persyaratan administratif, dan perubahan regulasi. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan LKS dalam mengakses program secara optimal.

Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan LKS sebagai mitra pelaksana. Melalui koordinasi yang lebih intensif, diharapkan berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditangani secara cepat. Pemerintah juga mulai mendorong peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pelatihan, meskipun masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki pelaksanaan program permakanan. Namun demikian, diperlukan langkah yang lebih sistematis dan berkelanjutan agar program dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan anak terlantar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam program permakanan telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan implementasi di lapangan.

Dalam perspektif teori, peran sebagai fasilitator dan regulator telah dijalankan dengan cukup baik, namun peran sebagai katalisator masih perlu diperkuat. Pemerintah perlu beralih dari pendekatan yang bersifat bantuan (*charity*) menuju pendekatan pemberdayaan (*empowerment*) agar program memiliki dampak jangka panjang. Dengan demikian, keberhasilan program permakanan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bantuan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola program secara efektif, melibatkan berbagai pihak, serta memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak terlantar melalui program permakanan di Kabupaten Cianjur telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Peran pemerintah sebagai fasilitator terlihat dari upaya penyediaan bantuan permakanan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak terlantar. Sebagai regulator, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan mekanisme pelaksanaan program guna memastikan penyaluran bantuan berjalan secara tertib

dan tepat sasaran. Sementara itu, sebagai katalisator, pemerintah telah berupaya mendorong peningkatan kesejahteraan anak melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan, seperti distribusi bantuan yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), kurangnya pembinaan dan pendampingan, serta dinamika perubahan regulasi yang cukup cepat. Upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut telah dilakukan melalui perbaikan sistem pendataan, sosialisasi program, dan peningkatan koordinasi, meskipun masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

Dengan demikian, diperlukan peningkatan kualitas tata kelola program, penguatan kapasitas kelembagaan, serta konsistensi kebijakan agar program permakanan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak terlantar.

REFERENSI

- Achmad, F. Y. N. (2021). Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Sistem Pelayanan Publik Dinas Komunikasi Dan Informasi Kota Bau-Bau. *Journal Publicuho*, 4(2). <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18195>
- Andari, S. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial. *Sosio Informa*, 6(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2200>
- Andriani, R., Supriyatno, B., & Sjarif, D. R. (2021). Gambaran Karakteristik Ibu, Pengetahuan, Dan Praktik Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu Pada Bayi Di Kota Pontianak. *Sari Pediatri*, 22(5), 277. <https://doi.org/10.14238/sp22.5.2021.277-84>
- Barbosa, P. M. R. (2024). The Developmental Welfare State in South Korea Under Globalization. *Brazilian Journal of Political Economy*, 44(1), 145–167. <https://doi.org/10.1590/0101-31572024-3412>
- Bharoto, R. M. H., Indrayanti, I., & Nursahidin, N. (2020). *Beggars, Homeless, and Displaced People: Psycho-Social Phenomena and the Implementation of Local Government Policy*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200402.052>
- Caminada, K., Goudswaard, K., Wang, C., & Wang, J. (2020). Antipoverty Effects of Various Social Transfers and Income Taxes Across Countries. *Social Indicators Research*, 154(3), 1055–1076. <https://doi.org/10.1007/s11205-020-02572-9>
- Ciciria, D., Ferliana, L., & Hamer, W. (2021). Analisis Konflik Antara Masyarakat Dengan Pemerintah Desa Di Desa Wonosari, Kecamatan Pekalongan Lampung Timur. *Social Pedagogy Journal of Social Science Education*, 2(2), 15. <https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v2i2.3512>
- Fatkuriyah, L., & Sukowati, U. (2022). Pola Asuh Ibu Dan Status Gizi Balita Di Kabupaten Jember. *Adi Husada Nursing Journal*, 8(2), 129. <https://doi.org/10.37036/ahnj.v8i2.357>
- Habibullah, H. (2020). Peran Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Pelayanan Sosial Terintegratif. *Sosio Konsepsia*, 9(3). <https://doi.org/10.33007/ska.v9i3.2043>



- Handayani, S. (2020). Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia (Lansia) Di Masa Pandemi. *Journal of Social Development Studies*, 1(2), 61–75. <https://doi.org/10.22146/jsds.657>
- Hudang, A. K., & Rewa, K. A. (2024). Pemanfaatan Dana PKH Pada Rumah Tangga Miskin Di Desa Kambata Tana Kabupaten Sumba Timur. *Journal of Human and Education (Jahe)*, 4(1), 106–120. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i1.562>
- HUMAIDI, H. (2022). Analisis Peran Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Perangkat Desa Terhadap Kinerja Dalam Pembebasan Lahan Hutan Konversi Menjadi Hak Milik Masyarakat Di Desa Tinggiran Darat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. *Kindai*, 18(2), 352–364. <https://doi.org/10.35972/kindai.v18i2.806>
- Jaelani, M. A., & Fidaris, N. (2024). Evaluasi Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM Di Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(2), 151–162. <https://doi.org/10.33592/jia.v14i2.4953>
- Kakwani, N., Wang, X., Xu, J., & Yue, X. (2021). Assessing the Social Welfare Effects of Government Transfer Programs: Some International Comparisons. *Review of Income and Wealth*, 67(4), 1005–1028. <https://doi.org/10.1111/roiw.12500>
- Lende, J. A., Orisa, M., & P, R. P. (2021). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Berbasis Web. *Jati (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 5(1), 225–234. <https://doi.org/10.36040/jati.v5i1.3318>
- Nahlati, N., Widodo, S. A., & Istiqomah, I. (2023). Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP Ditinjau Dari Self Efficacy Pada Model Pembelajaran SQ4R Dengan Project Assessment. *Hexagon Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Matematika*, 1(2), 134–144. <https://doi.org/10.33830/hexagon.v1i2.5486>
- Ngongira, S. O., & Iriani, A. (2020). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendelegasian Wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Ke Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Dalam Mengelola Pendidikan Menengah. *JMSP (Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan)*, 4(3), 173–181. <https://doi.org/10.17977/um025v4i32020p173>
- Nikmah, S. (2023). Implementasi Program Permakanan Surabaya Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta Stia Mataram*, 9(2), 288–306. <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v9i2.601>
- Nikmah, S., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Surabaya. *Publika*, 9(3), 195–210. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p195-210>
- Ogunkan, D. V. (2023). A Multisource Analysis of Child Streetism in Nigerian Urban Centres. *Development Policy Review*, 42(1). <https://doi.org/10.1111/dpr.12739>
- Ribanszki, R., Taylor, K. S., Scheutzwow, J., Fonseca, J. A. S., & Ponzio, S. (2022). Welfare Systems and Mental Health in OECD and EEA Countries: A Scoping Review. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01391-2>
- Rochana, E., Puspawati, A. A., Karmilasari, V., & Wibisono, D. (2022). Civil Society (Indonesian Islamic Business Forum) Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana Tsunami Selat Sunda. *Administratio Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 13(2), 177–190.



<https://doi.org/10.23960/administratio.v13i2.325>

- Setadi, S., Guna, S., & Cianjur, N. (2026). *The Relationship Between Law and Government Science : A Literature Review On Constitutional Law and Administrative Law*. 1(1), 1–11.
- Setiadi, S., Maulana, R., & Hidayat, S. (2025). Dampak Pungutan Desa terhadap Aset dan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Ilmu Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, 6(2), 160–180. <https://doi.org/10.37150/jimat.v6i2.3732>
- Simanjuntak, A. H., & Erwinsyah, R. G. (2020). Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2332>
- Thariq, E. F., Rofiyanti, E., & Agustina, D. P. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(1), 111–115. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i1.2806>
- Wahidah, M. A. H. (2018). Alokasi Pendapatan Negara Menurut Muhammad Baqir Al-Sadr Dan Relevansinya Dengan Sistem Jaminan Sosial Di Indonesia. *El-Barka Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 269–298. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1452>
- Zaradiva, A. M., & Megawati, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Semarang). *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 854–867. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.384>